



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

- Hari / Tanggal : Kamis / 31 Januari 2013
- Waktu : 10.00 – 12.15
- Tempat : Ruang Serayu – Gedung A.A. Maramis II Lantai 3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Agenda : 1. Hasil Rapat Tim Pengarah
2. Pelaporan dari Instansi Pemerintah & Perusahaan
3. Perkembangan Rekonsiliasi
4. Perkembangan Pengadaan Validator
5. Konferensi Global EITI di Sydney Mei 2013
6. Persiapan Pelaporan Tahap II EITI Indonesia

Peserta Rapat:

Pemerintah

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Delpina Siahaan
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yanti Sukmayanti
3. Kementerian Dalam Negeri, Dyah Kartika
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ery Nahari
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudjarwo
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Agus Cahyono Adi
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Yulianto
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal, Laode Sulaeman
9. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kumara Candra
10. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Hadi Pratomo
11. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, C. Risyana



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

12. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, M. Hijrah
13. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputusan Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Amar Yasir
14. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputusan Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Malidu Ahmad
15. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputusan Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Budi Utomo
16. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputusan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Hafil Widiyanto
17. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputusan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Restog Krisna Kusuma
18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur, Yoyok Suroyo
19. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Edward Noviansyah
20. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, Bantolo
21. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau, Januaris
22. Sekretariat Daerah Propinsi Riau, Emrizal Pakis
23. SKK Migas, Desti Melanti
24. SKK Migas, Sujoko
25. SKK Migas, Dwi Asianti W.
26. SKK Migas, Beti Damayanti
27. SKK Migas, Kurnia Ariwijayanti
28. SKK Migas, Edy Riantono

Industri

1. Indonesian Coal Mining Association, Supriatna Suhala
2. Indonesian Mining Association / PT. Freeport Indonesia, Rini G. Ranty

NGO

1. IDEA, Wasingatu Zakiyah
2. PWYP Indonesia, Maryati Abdullah
3. PWYP Indonesia, Yesi Maryam
4. Revenue Watch Institute, Roslita Arsyad
5. Revenue Watch Institute, Diah Tantri
6. IPC / PWYP Indonesia, Sulastio

Sekretariat EITI Indonesia

1. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
2. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

3. Administrative Specialist, Anita Pascalia

World Bank

1. Advisor on the EITI, David W. Brown
2. Senior Advisor, Frederic Cegarra Escolano

Ex. Tim Formatur EITI Indonesia

1. Erry Riyana Hardjapamekas

Rekonsiliator – KAP Gideon Ikhwan Sofwan

1. Irsan Thayeb

Risalah Rapat

Emy Perdanahari:

Atas nama Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan membuka rapat. Kemudian Frederic Cegarra Escolano dipersilakan untuk memberikan pesan singkat terkait pelaksanaan EITI di Indonesia.

Frederic Cegarra Escolano

Hal yang penting saat ini adalah adanya Tim Pelaksana ini dan keseluruhan proses EITI di Indonesia, termasuk proses rekonsiliasi dan validasi yang akan memberikan gambaran tentang proses EITI di Indonesia. Ia yakin Indonesia akan lolos dalam validasi, apalagi dengan banyaknya partisipan yang hadir dalam rapat ini.

Kemudian pemimpin rapat melanjutkan dengan pemaparan agenda-agenda tersebut sekaligus terlebih dahulu, kemudian peserta rapat akan membahasnya satu per satu. Paparan tersebut seperti tercantum dalam materi presentasi terlampir. Agenda yang dipaparkan adalah:

1. Hasil Rapat Tim Pengarah
2. Pelaporan dari Instansi Pemerintah & Perusahaan
3. Perkembangan Rekonsiliasi
4. Perkembangan Pengadaan Validator
5. Konferensi Global EITI di Sydney Mei 2013
6. Persiapan Pelaporan Tahap II EITI Indonesia



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Terkait dengan Pelaporan Tahap II, Ambarsari Dwi Cahyani menambahkan bahwa cost recovery adalah item baru dalam pelaporan kedua, mohon keputusan dari Tim Pelaksana – masukan dari stakeholder sebelumnya, sehingga belum akan direkonsiliasi. PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan mungkin bisa diusulkan untuk direkonsiliasi nanti karena dari Ditjen Bina Usaha Kehutanan sudah masuk menjadi anggota Tim Pelaksana. Untuk data unit produksi migas, mohon bantuan dari SKK Migas, Ditjen Migas dan Ditjen Anggaran karena tidak adanya tabel monitoring setoran migas dalam LKPP 2011.

Irsan Thayeb dari pihak rekonsiliator menjelaskan dasar pengajuan batas bawah angka ketidaksesuaian yang perlu diselesaikan yaitu berdasarkan judgement / sebaran error maka dengan usulan angka batas bawah tersebut jumlah yang direkonsiliasi masih diatas 90%, dan juga adanya perbedaan pembulatan angka yang tidak terlalu signifikan untuk direkonsiliasi.

Peserta rapat mengemukakan pendapatnya untuk masing-masing agenda sebagai berikut:

1. Hasil Rapat Tim Pengarah

Tidak ada komentar dari peserta rapat untuk agenda ini.

2. Pelaporan dari Instansi Pemerintah & Perusahaan

Desti Melanti:

Informasi dari partner tidak pernah kami mintakan karena kontrak dilakukan oleh pemerintah adalah dengan operator. Jika ada perubahan partner di tengah tahun, yang harus melapor untuk EITI apakah partner yang terdaftar di akhir tahun atau semua partner yang terdaftar di tahun tersebut?

Ambarsari Dwi Cahyani:

Data yang diterima dari Ditjen Anggaran adalah laporan di akhir tahun, dimana kami tidak lihat mengenai cut-off date nya, tapi seharusnya semua data ada dalam laporan dari Ditjen Anggaran tersebut. Jadi sebaiknya partner yang dilaporkan adalah semua partner, yang terdaftar pada tahun tersebut.

3. Perkembangan Rekonsiliasi

Erry Riyana Hardjapamekas:



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Apa dasar judgement penentuan batas bawah?

Bahwa penentuan batas bawah rekonsiliasi adalah dengan mempertimbangkan manfaat dibanding biayanya, bukan mencari akurasi tapi kewajaran, dalam hal ini dengan angka USD 500.000 untuk migas dan USD 5.000 untuk pertambangan masih meliputi > 90% perusahaan.

Januaris:

Mengingat EITI adalah standar internasional, mengapa tidak mencari perbandingan dari negara lain tentang batas bawah ini?

David W. Brown:

Kami tidak memiliki data mengenai perbandingan tersebut, namun menurut peraturan EITI mengatakan bahwa negara dapat menentukan batas bawahnya masing-masing sepanjang angka tersebut disetujui oleh Tim Pelaksana.

Maryati:

Angka batas bawah ini sudah wajar. Mohon dijelaskan redaksinya apakah angka tersebut adalah angka untuk masing-masing jenis pembayaran, atau untuk masing-masing perusahaan / unit produksi.

Irsan Thayeb:

Untuk setiap jenis pembayaran.

Sujoko:

Bagaimana nantinya proses rekonsiliasi akan dijalankan, apakah akan ada konfirmasi kepada pihak pemerintah dan perusahaan?

Emy Perdanahari:

Dalam proses rekonsiliasi, rekonsiliator akan meminta konfirmasi kepada pihak pemerintah dan perusahaan.

Irsan Thayeb:

Rekonsiliator saat ini sudah mulai bekerja dan sudah mulai meminta konfirmasi dari beberapa instansi pemerintah dan perusahaan.

Ambarsari Dwi Cahyani:



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Mohon maaf kami belum sempat mendatangi SKK Migas terkait dengan rekonsiliasi data, karena terkait dengan adanya perubahan organisasi di SKK Migas dan memang belum ada data yang akan kami konfirmasi.

4. Perkembangan Pengadaan Validator

Maryati:

Kami dari CSO kuatir karena syarat untuk lolos validasi adalah adanya 2 laporan yang sudah dipublikasi dalam T-2. Bagaimana scenario untuk mengatasi masalah ini, jika misalnya Indonesia *delisted* dari EITI di bulan April nanti, atau kita akan minta perpanjangan waktu.

Emy Perdanahari:

Rasanya penilaian validasi bukan hanya jumlah laporan, tapi juga prosesnya.

Erry Riyana Hardjapamekas:

We'll do our best. Bisa saja kita meminta perpanjangan, atau bisa saja kita keluar dari EITI. Tapi yang penting kita usahakan yang terbaik, dan saya juga akan memperjuangkannya di EITI Board.

Roslita Arsyad:

Bagaimana tentang publikasi laporan, apakah sudah ada rencana kerja dari sekretariat untuk ini?

Emy Perdanahari:

Kami akan segera merekrut Communication Specialist untuk mendukung proses publikasi ini.

Maryati:

Apakah hari ini akan validator akan ditetapkan?

Apa yang harus dipersiapkan oleh Tim Pelaksana terkait dengan proses validasi?

Ambarsari Dwi Cahyani:

Betul hari ini akan ditetapkan pemenang untuk validator.

Mengenai persiapan dan kegiatan akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat karena prosesnya tergantung validator.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

David W. Brown:

Berdasarkan pengalaman saya sebagai validator di Timor Leste dan Yaman (dimana keduanya lolos validasi), saya yakin Indonesia akan lolos validasi. Validator akan datang ke Indonesia dan akan berkonsultasi dengan stakeholder termasuk dengan Tim Pelaksana dan/atau Tim Teknis. Bulan November yang lalu kami sudah mengadakan workshop untuk persiapan validasi.

5. Konferensi Global EITI di Sydney Mei 2013

Anggota Tim Pelaksana diminta untuk memberikan usulan 2 nama dari masing-masing instansi yang akan diikutsertakan dalam konferensi tersebut dengan pembiayaan dari instansi masing-masing (4 orang akan dibiayai dari EITI International).

Maryati:

Dari kementerian, asosiasi dan masyarakat sipil dapat memberikan materi untuk pameran, bukan hanya dari sekretariat.

6. Persiapan Pelaporan Tahap II EITI Indonesia

Yoyok Suroyo:

Usul untuk merekonsiliasi cost recovery karena sangat berpengaruh terhadap DBH (karena merupakan faktor pengurang yang cukup besar).

Januaris:

Usul yang sama.

Agus Cahyono Adi:

Saat ini belum bisa berkomentar tentang hal ini, karena cost recovery ini baru dan juga pimpinan di Ditjen Migas baru harus kami konsolidasikan dulu. Kami akan memberikan tanggapan tertulis apakah dari Ditjen Migas menyetujui tentang masuknya cost recovery dalam pelaporan 2010 dan 2011 ini.

Delpina Siahaan:

Pajak penghasilan apakah sudah masuk branch profit tax?

Mengenai cost recovery sudah ada hasil audit gabungan antara BP Migas, BPKP dan Ditjen Pajak. Jika mau direkonsiliasi dengan apa?



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Ambarsari Dwi Cahyani:

Pajak migas sudah termasuk branch profit tax.

Mengenai cost recovery menunggu dari Ditjen Migas dan SKK Migas.

Terkait pajak lainnya dari migas (PPH 26, 23, 21) belum ada rekomendasi untuk memasukkan dalam pelaporan. Dalam pertambangan relatif muncul kemungkinan jumlah pajaknya cukup merata. Dari industri migas mungkin besarnya tidak sebesar *entitlement* dari pemerintah, jadi mungkin karena itu tidak diusulkan. Pada prinsipnya kami hanya memfasilitasi usulan, dan tidak terlalu banyak mengubah dari template sebelumnya.

Emrizal Pakis:

Cost recovery seharusnya direkonsiliasi agar memperkuat transparansi. Pergantian pejabat seharusnya tidak menjadi alasan.

Emy Perdanahari:

Mudah-mudahan dari Ditjen Migas dan SKK Migas dapat segera memberikan jawaban tertulis segera setelah risalah rapat dikirimkan.

Erry Riyana Hardjapamekas:

Cost recovery ini memang ditakutkan ada kecurangan, jadi memang solusinya harus transparan. Karena sudah ada audit gabungan BPKP, Ditjen Pajak dan SKK Migas, dilaporkan saja secara transparan cost recovery tersebut, jadi pasti harusnya bisa disetujui.

Edward Noviansyah:

Cost recovery adalah dalam bentuk in-kind, tapi dilaporkan dalam bentuk USD. Jadi seharusnya memang direkonsiliasi.

Desti Melanti:

Memang betul pembayaran cost recovery adalah dalam bentuk in-kind. Namun perlu disepakati, apakah yang akan direkonsiliasi adalah dalam in-kind (volume) atau dalam USD. Tinggal menunggu dari atasan. Jika perlu dilaporkan maka dalam bentuk satuan apa, in-kind atau cash dan perlu diputuskan angka mana yang dipublikasi USD atau volume.

C. Risyana:

Sudah dipahami bahwa semua data yang dilaporkan harus yang sudah diaudit. Namun demikian masih perlu pemahaman tentang Cost Recovery. Sehingga perlu dilakukan pembahasan khusus untuk membahas ini.

Emy Perdanahari:



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Sepertinya 90 persen anggota tim pelaksana setuju bahwa cost recovery masuk dalam pelaporan kedua. anggota Tim Pelaksana diminta memberikan masukan tertulis mengenai cost recovery ini, paling lambat minggu kedua Februari. Kemudian akan dilakukan rapat khusus untuk membahas hal ini.

Rini G. Ranty:

Mohon masukannya untuk Asosiasi Pertambangan Indonesia terkait dengan pelaporan.

Irsan Thayeb:

Kami akan mengadakan workshop untuk konfirmasi data.

Ambarsari Dwi Cahyani:

Discrepancy dapat disebabkan oleh adanya kesalahan interpretasi, pergantian PIC dalam sosialisasi dan pelaporan. Untuk menghemat waktu akan diadakan workshop untuk mengkonfirmasi data. Workshop dapat dilakukan terpisah antara perusahaan dan instansi pemerintah, atau bersama-sama, di Sekretariat EITI.

Roslita Arsyad:

Data yang dilaporkan dari Ditjen Pajak masih belum lengkap, apakah ada tindak lanjut yang harus dilakukan?

Kumara Candra:

Data lengkap sudah kami serahkan melalui email pagi ini kepada Ibu Ambar. Namun surat pengantar secara tertulis sedang kami mintakan tanda tangan. Kendala yang dialami selama ini adalah adanya perbedaan antara NPWP (kode KPP atau kode cabang) di lembar otorisasi dengan data di Ditjen Pajak (nama sama, NPWP berbeda). Akan didiskusikan lebih lanjut dengan Ibu Ambar.

Wasingatu Zakiyah:

Mengenai DMO dari pertambangan apakah perlu dilaporkan?

Supriatna Suhala:

Saat ini belum semua perusahaan wajib DMO. Namun ada penalti besar bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Ambarsari Dwi Cahyani:

Apakah DMO berkontribusi besar terhadap APBN? Perlu kajian lebih lanjut mengenai hal ini.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Supriatna Suhala:

DMO berguna untuk menjaga pasokan untuk negara.

C. Risyana:

Untuk kategori daerah yang akan masuk dalam pelaporan kedua sebaiknya didetailkan sampai kabupaten.

Emy Perdanahari:

Akan dibahas lebih lanjut dengan DJPK untuk penentuan daerah yang akan masuk dalam pelaporan kedua.

Irsan Thayeb:

Mohon bantuan dari IMA dan APBI untuk memberikan data kontak perusahaan pertambangan yang belum dapat dihubungi oleh rekonsiliator.

Maryati:

Sebaiknya pengadaan rekonsiliator untuk pelaporan kedua dimajukan jadwalnya agar dapat mempercepat proses. Apakah ada kendala pendanaan?

Emy Perdanahari:

Frederic akan membantu untuk mempercepat dana hibah kedua, jika secepatnya disetujui kita dapat mempercepat proses pengadaan rekonsiliator.

Semua anggota Tim Pelaksana harap memberikan masukan mengenai cost recovery dan memberikan 2 nama yang akan diikutsertakan dalam konferensi di Sydney.

Januaris:

Data KKKS perlu diperbarui.

Desti Melanti:

Akan diperbarui.

Rapat selesai.